

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Kemiskinan**

###### **2.1.1.1 Definisi Kemiskinan**

Istilah "kemiskinan" berasal dari kata "miskin", yang berarti "kekurangan aset". Kemiskinan pada prinsipnya digambarkan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut definisi Badan Pusat Statistik, penduduk miskin adalah mereka yang berada di bawah garis kemiskinan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, baik pangan maupun non-pangan, yang diukur berdasarkan pengeluaran. Dengan kata lain, kategori penduduk miskin mencakup mereka yang rata-rata pengeluaran per kapita bulannya berada di bawah ambang batas garis kemiskinan.

Kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, obat-obatan, dan tempat tinggal (Hardinandar, 2019). Ketiadaan akses pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan memperoleh kehormatan yang diperlukan sebagai warga negara disebut dengan derajat kemiskinan. Lebih lanjut dikatakan bahwa tingkat kemiskinan adalah suatu kondisi yang berada di bawah garis nilai standar untuk kebutuhan minimal, termasuk makanan dan non- 19 makanan, yang dikenal sebagai garis kemiskinan atau ambang batas kemiskinan.

Kemiskinan didefinisikan sebagai status sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk memelihara dan

membangun penghidupan yang layak, menurut Undang-Undang (UU) No. 24 Tahun 2004. Pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, air bersih, tanah, sumber daya alam, lingkungan, rasa aman dari penyalahgunaan atau ancaman kekerasan, dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik adalah contoh persyaratan mendasar yang merupakan hak seseorang atau sekelompok orang.

Chambers dalam Listyaningsih (2018), mengajukan konsep kemiskinan sebagai sebuah *integrated concept* dengan cakupan yang luas, mencakup lima dimensi utama:

1. Kemiskinan (*Poverty*)

Realitas kemiskinan dapat dilihat dari situasi di mana pendapatan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pendekatan ini tidak hanya berlaku bagi mereka yang sama sekali tidak memiliki penghasilan, melainkan juga relevan bagi kelompok yang memiliki pendapatan namun tetap tidak mencukupi.

2. Ketidakberdayaan (*Powerless*)

Pada umumnya, terbatasnya kapasitas ekonomi berdampak pada melemahnya kekuatan sosial seseorang atau kelompok, khususnya dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan hak untuk menjalani kehidupan yang layak.

3. Kerentanan Menghadapi Situasi Darurat (*State of Emergency*)

Individu atau kelompok yang tergolong miskin memiliki keterbatasan dalam menghadapi kejadian tak terduga yang memerlukan pengeluaran mendadak, seperti bencana alam atau kondisi kesehatan yang memburuk. Sebagai contoh, ketika

memerlukan biaya pengobatan yang tinggi atau menghadapi kondisi darurat lainnya, kapasitas penghasilan mereka tidak memadai untuk mengatasi situasi tersebut.

#### 4. Ketergantungan (*Dependence*)

Masyarakat yang berada dalam kondisi miskin umumnya memiliki keterbatasan baik dari segi ekonomi maupun kekuatan sosial, sehingga sangat bergantung pada bantuan pihak lain. Mereka tidak memiliki kapasitas atau daya untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, terutama yang berkaitan dengan penciptaan sumber pendapatan baru. Untuk mengatasi berbagai masalah, dukungan dari pihak eksternal, khususnya terkait aliran pendapatan, menjadi sangat krusial.

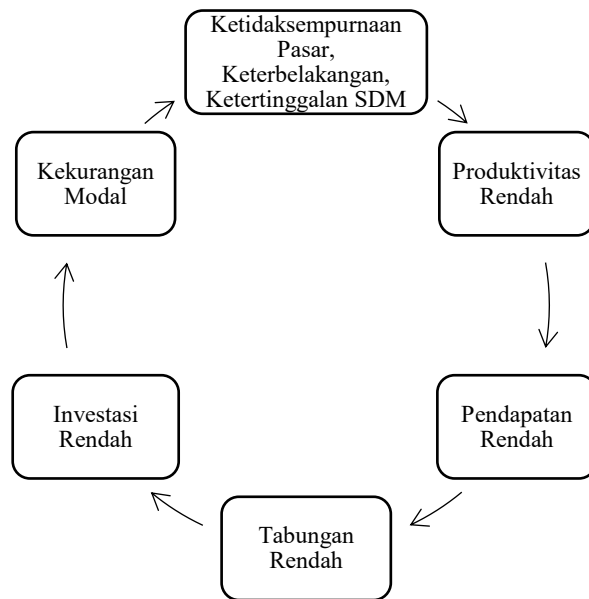
#### 5. Keterasingan (*Isolation*) Geografis dan Sosiologis

Dimensi keterasingan menurut Chambers berkaitan dengan faktor lokasi geografis yang menjadi penyebab kemiskinan seseorang atau kelompok. Pada umumnya, mereka yang dikategorikan miskin bermukim di wilayah yang terpencil atau jauh dari pusat-pusat aktivitas ekonomi. Hal ini disebabkan karena sebagian besar program kesejahteraan cenderung terkonsentrasi di pusat pertumbuhan ekonomi seperti kawasan perkotaan dan kota-kota besar. Akibatnya, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dengan akses terbatas terhadap layanan sosial memiliki standar hidup yang relatif rendah, yang pada akhirnya memperparah kondisi kemiskinan.

### 2.1.1.2 Teori Lingkaran Kemiskinan

Teori yang digunakan yaitu Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Cycle of Poverty*) oleh Ragnar Nurkse (1953) dalam Sari & Nuraini (2020). Teori tersebut mengemukakan bahwa kemiskinan yang tidak mempunyai ujung dan pangkalnya yang mana semua unsur yang menyebabkan kemiskinan akan saling berhubungan. Yang dimaksud lingkaran kemiskinan adalah suatu rangkaian yang saling mempengaruhi satu sama lain secara sedemikian rupa, sehingga menimbulkan suatu keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik.

Adanya keterbelakangan, ketidak sempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, baik investasi manusia maupun investasi kapital. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Logika berpikir ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse 1953 yang menyatakan "*a poor country is a poor because it is poor*" (negara miskin itu miskin karena dia miskin).



Sumber: R. Nurkse (1953)

### Gambar 2.1 Lingkaran Kemiskinan Ragnar Nurkse

Ragnar Nurkse (1953) dalam Wahyudi, A et.al (2016) menjelaskan bahwa kemiskinan (ketidaksejahteraan) disertai dengan ketidaksempurnaan pasar, ketertinggalan, serta keterbelakangan masyarakat berkontribusi pada rendahnya produktivitas. Suatu wilayah akan terus mengalami ketertinggalan apabila tidak segera menerapkan mekanisme ekonomi yang modern dan sehat, sehingga laju perekonomian akan terhambat dan terus berada dalam siklus ekonomi yang rendah atau tidak optimal. Ketidakefisienan ekonomi juga memberikan dampak negatif terhadap aktivitas produksi, khususnya dalam aspek ketenagakerjaan.

Dari perspektif ketenagakerjaan, pergeseran mekanisme pasar dapat mengakibatkan upah atau pendapatan yang rendah bagi para pekerja. Perubahan dalam permintaan dan penawaran barang serta jasa akan mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Para pelaku usaha yang berperan sebagai produsen akan melakukan perhitungan ulang terhadap modal dan pendapatan yang diperoleh.

Untuk mempertahankan keuntungan, pelaku usaha akan menekan biaya produksi dengan cara mengganti kualitas bahan baku, menurunkan upah, atau mengurangi jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Kualitas produk yang buruk akan menurunkan permintaan konsumen dan mengurangi output produksi. Upah yang rendah akan menurunkan motivasi pekerja dan melemahkan proses produksi. Pengurangan jumlah tenaga kerja akan berakibat pada meningkatnya pengangguran dan terhentinya kegiatan produksi. Kondisi ini akan memicu permasalahan ekonomi berupa rendahnya produktivitas dalam perekonomian. Pada akhirnya, seluruh aspek ekonomi seperti pendapatan, produksi, dan konsumsi juga akan mengalami penurunan.

Dari sisi permintaan, lingkaran kemiskinan terjadi melalui tingkat permintaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada fenomena negara miskin, negara tersebut memiliki tingkat pendapatan yang rendah. Implikasi ini akan mengarah pada rendahnya permintaan kebutuhan masyarakat, sebagai dampak dari kemampuan masyarakat yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka dan tidak mampu memenuhi kebutuhan lainnya. Kondisi rendahnya tingkat permintaan ini juga akan menyebabkan rendahnya investasi. Investor tentu tidak tertarik untuk menanamkan modalnya karena menilai bahwa investasi besar-besaran di negara tersebut tidak akan menguntungkan.

Dari sisi penawaran, negara dengan pendapatan rendah akan mendorong masyarakat untuk mengonsumsi kebutuhan secukupnya, dan mereka akan berusaha menabung sebagian atau sisa dari pendapatan mereka di bank. Akibatnya, perbankan akan menerima tabungan tersebut dalam jumlah yang terbatas.

Sementara itu, pelaku usaha yang membutuhkan modal menginginkan modal yang cukup untuk mengembangkan usaha atau melakukan investasi. Karena tabungan yang rendah, bank hanya mampu memberikan modal yang terbatas kepada pelaku usaha. Hal ini akan menghambat aktivitas permodalan para pelaku usaha untuk berinvestasi di negara tersebut. Akibatnya, kegiatan perekonomian akan berada dalam kondisi ketidaksempurnaan pasar, dan kejadian tersebut akan terjadi secara berulang atau tidak memiliki titik akhir.

### **2.1.1.3 Jenis-jenis Kemiskinan**

Listyaningsih (2018) mengelompokkan kemiskinan berdasarkan karakteristik yang dimilikinya ke dalam beberapa kategori berikut:

#### **1. Kemiskinan Absolut**

Kemiskinan absolut merujuk pada keadaan di mana tingkat pendapatan seseorang berada di bawah standar kehidupan yang memadai, yang diukur menggunakan indikator garis kemiskinan. Individu dalam kategori ini tidak memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal.

#### **2. Kemiskinan Relatif**

Jenis kemiskinan ini muncul akibat dampak dari kebijakan pembangunan yang distribusinya belum merata ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Perbedaan tingkat pendapatan antarindividu tersebut kemudian menjadi dasar penetapan tingkat kemiskinan yang sifatnya tidak tetap dan sulit dibandingkan antarwilayah.

### 3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural bersumber dari perilaku dan mentalitas individu atau kelompok masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor budaya. Hal ini tercermin dalam sikap enggan memperbaiki taraf hidup, kemalasan, pola konsumtif, serta minimnya kreativitas meskipun telah mendapat bantuan dari pihak eksternal. Kondisi ini justru memperburuk tingkat kemiskinan, atau dapat dikatakan bahwa kemiskinan terjadi karena dipelihara oleh kemiskinan itu sendiri.

### 4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural merupakan kondisi yang timbul karena terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya, yang disebabkan oleh sistem sosial budaya dan politik yang tidak mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Sistem tersebut justru melanggengkan kemiskinan. Contohnya adalah program bantuan untuk usaha kecil dan menengah yang menetapkan persyaratan yang sulit dipenuhi oleh kelompok sasaran.

Selain keempat klasifikasi di atas, kemiskinan dapat pula dibedakan menjadi dua kategori tambahan, yaitu:

#### 1. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan jenis ini berkaitan dengan keterbatasan sumber daya alam, minimnya infrastruktur publik, serta kondisi geografis yang kurang produktif seperti tanah tandus. Isolasi geografis yang membatasi akses terhadap peluang pengembangan ekonomi menyebabkan penduduk terperangkap dalam lingkaran kemiskinan. Kemiskinan alamiah lebih dominan terjadi di wilayah perdesaan dan daerah tertinggal.

## 2. Kemiskinan Buatan (*Artificial*)

Kemiskinan buatan terutama disebabkan oleh proses modernisasi atau pembangunan yang mengakibatkan masyarakat tidak memiliki kontrol yang setara atas sumber daya, sarana, serta fasilitas ekonomi yang tersedia.

Berbeda dengan kemiskinan buatan, kemiskinan alamiah menunjukkan bahwa jerat kemiskinan dipicu oleh kondisi dan kualitas masyarakat itu sendiri. Anak-anak dari keluarga miskin menghadapi hambatan yang lebih besar untuk keluar dari kemiskinan karena keterbatasan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

### 2.1.1.4 Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Suharto (2005) yang dikutip dalam Adawiyah (2020) mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, antara lain:

#### 1. Faktor Individual

Faktor ini berkaitan dengan kondisi fisik, psikologis, pola perilaku, preferensi gaya hidup, atau kapasitas seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Dalam perspektif ini, kemiskinan dipandang sebagai konsekuensi dari keterbatasan atau pilihan-pilihan yang dibuat oleh individu miskin itu sendiri.

#### 2. Faktor Sosial

Faktor sosial mengacu pada situasi lingkungan masyarakat yang menjerumuskan individu ke dalam kemiskinan, seperti praktik diskriminasi yang didasarkan pada usia, gender, maupun etnis. Selain itu, faktor ini juga meliputi

kondisi sosial ekonomi keluarga yang dapat memicu transmisi kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

### 3. Faktor Kultural

Faktor kultural merujuk pada nilai-nilai budaya atau pola kebiasaan hidup yang cenderung negatif dan dapat mempertahankan kondisi kemiskinan. Hal ini berhubungan dengan konsep "budaya kemiskinan" atau "*culture of poverty*" yang diperkenalkan oleh Oscar Lewis. Menurut Suharto kelompok masyarakat miskin sering kali memiliki subkultur khusus yang ditandai dengan karakteristik seperti kemalasan, sikap fatalistik, rendahnya semangat kewirausahaan, serta lemahnya etos kerja.

### 4. Faktor Struktural

Faktor struktural berkaitan dengan sistem atau tatanan sosial, politik, dan ekonomi yang tidak adil, kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin, atau memberikan akses yang terbatas bagi mereka. Sebagai ilustrasi, implementasi sistem ekonomi neoliberalisme di Indonesia telah menyebabkan kelompok-kelompok seperti petani, nelayan, dan pekerja sektor informal semakin termarginalkan akibat beban perpajakan dan kebijakan investasi yang lebih berpihak kepada investor besar dan asing.

#### **2.1.1.5 Ukuran Kemiskinan**

Terdapat beberapa indikator dalam mengukur kemiskinan (Badan Pusat Statistik 2022), diantaranya sebagai berikut:

1. Konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*).

Konsep ini mengacu pada buku Pegangan Kemiskinan dan Ketimpangan yang diterbitkan oleh Bank Dunia. Dalam pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai kurangnya kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan, diukur dari segi pengeluaran. Suatu penduduk dikatakan miskin jika rata-rata pengeluaran bulanan per kapitanya berada di bawah garis kemiskinan.

## 2. Garis Kemiskinan (GK)

Mencerminkan nilai rupiah dari pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup (baik makanan maupun bukan makanan) selama satu bulan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah kebutuhan konsumsi pangan minimal setara dengan 2.100 kkal per orang per hari. Paket produk sembako dasar diwakili oleh 52 jenis produk (sereal, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, lemak, dll.) Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah jumlah minimum pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Satu paket produk kebutuhan pokok non-pangan diwakili oleh 51 produk berbeda di perkotaan dan 47 produk berbeda di pedesaan.

Rumus perhitungan:

$$\mathbf{GK = GKM + GKNM}$$

Dimana:

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

### 3. Persentase Penduduk Miskin

*Head Count Index* (HCI-PO) adalah presentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK). Semakin rendah angka *Head Count Index*, maka semakin sedikit orang yang hidup di bawah garis kemiskinan Dan sebaliknya, jika *Head Count Index* tinggi, berarti persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan juga tinggi.

### 4. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

### 5. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

#### **2.1.1.6 Indikator Tingkat Kemiskinan**

Terdapat empat indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan (Arsyad, 2016):

##### a. Tingkat konsumsi beras

Jumlah beras yang dikonsumsi per kapita digunakan sebagai ukuran kemiskinan. Penduduk di pedesaan yang mengkonsumsi beras kurang dari 240 kg

per kapita per tahun dianggap miskin. Ini adalah 360 kilogram per kapita per tahun di daerah perkotaan.

b. Tingkat pendapatan

Mengukur kemiskinan dapat pula dilakukan dengan melihat distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat dikatakan terjadinya ketimpangan pendapatan. Todaro dan Smith (2006) dalam Arsyad (2016) memisahkan besaran mendasar dari distribusi pendapatan menjadi dua bagian: distribusi pendapatan pribadi dan distribusi pendapatan fungsional. Distribusi pendapatan pribadi, yang biasanya digunakan sebagai metrik langsung untuk mengukur jumlah uang yang diterima oleh setiap individu atau keluarga. Akibatnya, para ekonom dan ahli statistik menghitung jumlah pendapatan semua individu dan kemudian membagi populasi lengkap menjadi beberapa kelompok atau ukuran.

c. Indikator kesejahteraan rakyat

Menurut publikasi PBB tahun 1961 dalam Arsyad (2016), *International Definition and Measurement of Levels of Living: An Interim Guide*, ada 9 (sembilan) komponen yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan. Kesembilan komponen tersebut adalah kesehatan, konsumsi pangan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi, dan kebebasan.

d. Indeks Kemiskinan Manusia

Indikator lain untuk mengukur tingkat kemiskinan masyarakat di suatu wilayah dengan menggunakan Indeks Tingkat kemiskinan Manusia (*Human Poverty Index*) (Arsyad, 2016). Menurut UNDP (*United Nations Development*

*Program*). Besarnya tingkat kemiskinan ditentukan oleh tiga nilai utama: kualitas hidup, tingkat pendidikan dasar, dan tingkat stabilitas ekonomi.

## **2.1.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

### **2.1.2.1 Definisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Badan Pusat Statistik (2021) mendefinisikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebagai indikator yang menggambarkan perbandingan penduduk usia produktif yang aktif dalam pasar ketenagakerjaan, baik yang sedang bekerja maupun yang mencari pekerjaan. Indikator ini mencerminkan ketersediaan sumber daya manusia yang siap berkontribusi dalam kegiatan produksi barang dan jasa. Secara teknis, TPAK merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan total penduduk usia 15 tahun ke atas, sehingga menunjukkan besaran tenaga kerja yang tersedia dalam perekonomian.

Definisi ini sejalan dengan Simanjuntak (2002) sebagaimana dikutip dalam Murialti dan Romanda (2020), yang menyatakan bahwa *Labour Force Participation Rate (LFP)* atau TPAK adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja dalam kelompok yang sama. Badan Pusat Statistik (2016) juga menegaskan bahwa TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas, dihitung melalui formula:

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100\%$$

Semakin besar TPAK, semakin besar pula jumlah angkatan kerja dalam kelompok usia kerja yang sama. Sebaliknya, semakin besar jumlah penduduk yang bersekolah atau mengurus rumah tangga, semakin besar pula jumlah penduduk

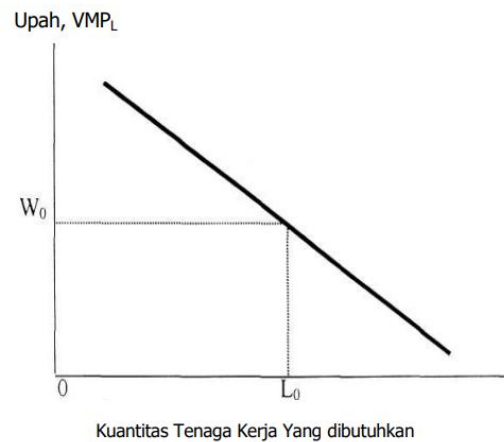
yang termasuk bukan angkatan kerja. Hal tersebut menyebabkan jumlah angkatan kerja menjadi lebih kecil, sehingga TPAK juga akan semakin kecil.

### **2.1.2.2 Teori Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

#### **1. Permintaan Tenaga Kerja**

Permintaan dalam konteks ekonomi didefinisikan sebagai jumlah maksimum suatu barang atau jasa yang dikehendaki seorang pembeli untuk dibelinya pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu (Sudarsono, 1990 dalam Sholeh, 2007). Dalam hubungannya dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan. Sehingga permintaan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan seorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu.

Miller & Meiners (1993) dalam Sholeh (2007), berpendapat bahwa permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh nilai marjinal produk (Value of Marginal Product, VMP). Nilai marjinal produk (VMP) merupakan perkalian antara Produk Fisik Marginal (Marginal Physical Product, MPP) dengan harga produk yang bersangkutan.



Sumber: Sholeh M, 2007

**Gambar 2.2 Kurva Permintaan Tenaga Kerja**

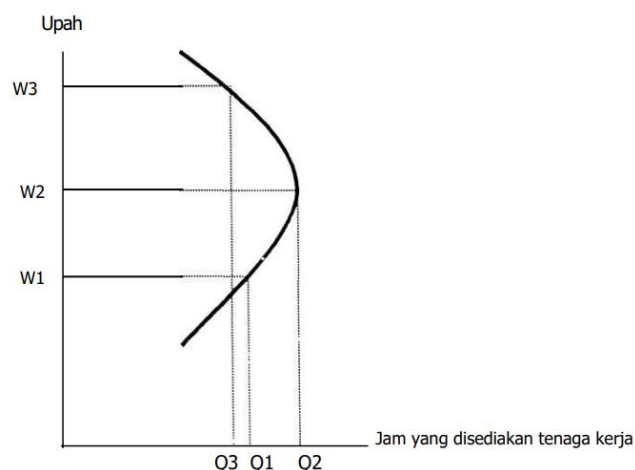
Kurva VMP untuk tenaga kerja merupakan kurva permintaan tenaga kerja jangka pendek dari perusahaan yang bersangkutan yang beroperasi dalam pasar persaingan sempurna (dengan Catatan kuantitas semua input lainnya konstan). Bagi setiap perusahaan yang beroperasi dalam pasar kompetisi sempurna itu, harga outputnya senantiasa konstan terlepas dari berapa kuantitas output yang dijualnya. Harga input disini juga kita asumsikan konstan. Penawarannya elastisitas sempurna untuk semua perusahaan. Dengan demikian kuantitas tenaga kerja yang memaksimalkan laba perusahaan terletak pada titik perpotongan antara garis upah (Tingkat upah yang berlaku untuk pekerja terampil yang dibutuhkan perusahaan) dan kurva VMP perusahaan. Ini diperlihatkan oleh gambar 2.2.

Jika tingkat upah per unit pekerja yang kualitasnya konstan adalah  $w_0$  maka kuantitas pekerja yang optimal adalah  $L_0$ . Garis horizontal yang bertolak dari  $W_0$  merupakan kurva penawaran tenaga kerja untuk setiap perusahaan yang beroperasi dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif sempurna.

## 2. Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Dalam teori klasik sumberdaya manusia (pekerja) merupakan individu yang bebas mengambil keputusan untuk bekerja atau tidak. Bahkan pekerja juga bebas untuk menetapkan jumlah jam kerja yang diinginkannya. Teori ini didasarkan pada teori tentang konsumen, dimana setiap individu bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan dengan kendala yang dihadapinya.

Menurut G.S Becker (1976) dalam Sholeh (2007), Kepuasan individu bisa diperoleh melalui konsumsi atau menikmati waktu luang (*leisure*). Sedang kendala yang dihadapi individu adalah tingkat pendapatan dan waktu. Bekerja sebagai kontrofersi dari *leisure* menimbulkan penderitaan, sehingga orang hanya mau melakukan kalau memperoleh kompensasi dalam bentuk pendapatan, sehingga solusi dari permasalahan individu ini adalah jumlah jam kerja yang ingin ditawarkan pada tingkat upah dan harga yang diinginkan.



Sumber: Sholeh M, 2007

**Gambar 2.3 Kurva Penawaran Tenaga Kerja**

Kombinasi waktu non pasar dan barang-barang pasar terbaik adalah kombinasi yang terletak pada kurva indefferensi tertinggi yang dapat dicapai dengan kendala tertentu. sebagaimana gambar 2.3, kurva penawaran tenaga kerja mempunyai bagian yang melengkung ke belakang. Pada tingkat upah tertentu penyediaan waktu kerja individu akan bertambah apabila upah bertambah (dari  $W$  ke  $W_1$ ). Setelah mencapai upah tertentu ( $W_1$ ), penambahan upah justru mengurangi waktu yang disediakan oleh individu untuk keperluan bekerja (dari  $W_1$  ke  $W_N$ ). Hal ini disebut Backward Bending Supply Curve.

Layard dan Walters (1978) dalam Sholeh (2007), menyebutkan bahwa keputusan individu untuk menambah atau mengurangi waktu luang dipengaruhi oleh tingkat upah dan pendapatan non kerja. Adapun tingkat produktivitas selalu berubah-ubah sesuai dengan fase produksi dengan pola mula-mula naik mencapai puncak kemudian menurun.

Semakin besar elastisitas tersebut semakin besar peranan input tenaga kerja untuk menghasilkan output, berarti semakin kecil jumlah tenaga kerja yang diminta. Sedangkan untuk menggambarkan pola kombinasi faktor produksi yang tidak sebanding (Variable proportions) umumnya digunakan kurva isokuan (isoquantities) yaitu kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi faktor produksi (tenaga kerja dan kapital) yang menghasilkan volume produksi yang sama. Lereng isokuan menggambarkan laju substitusi teknis marginal atau marginal Rate of Technical Substitution atau dikenal dengan istilah MRS. Hal ini dimaksudkan untuk melihat hubungan antara faktor tenaga kerja dan kapital yang merupakan lereng dari kurva isoquant.

### 2.1.2.3 Faktor yang Mempengaruhi TPAK

Menurut Sumarsono (2003) Tinggi rendahnya TPAK dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:

1. Jumlah penduduk yang bersekolah

Besaran TPAK sangat bergantung pada jumlah penduduk yang masih mengenyam pendidikan. Ketika proporsi penduduk yang bersekolah meningkat, jumlah angkatan kerja cenderung berkurang. Ketersediaan infrastruktur pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, serta implementasi kebijakan pendidikan wajib dari pemerintah secara tidak langsung berkontribusi terhadap penurunan TPAK.

2. Jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga

Jumlah penduduk yang fokus pada pengelolaan rumah tangga memberikan pengaruh terhadap nilai TPAK. Rendahnya angka TPAK mengindikasikan tingginya jumlah anggota keluarga yang berperan dalam aktivitas domestik. Pekerjaan domestik merujuk pada aktivitas yang dilakukan tanpa kompensasi finansial, misalnya seorang ibu bersama anak-anaknya yang menangani berbagai urusan rumah.

3. Tingkat penghasilan keluarga

Keluarga dengan pendapatan memadai untuk mencukupi kebutuhan hidup umumnya tidak mengharuskan seluruh anggota keluarga untuk bekerja. Sebaliknya, ketika biaya hidup tinggi namun pendapatan keluarga terbatas, terdapat kecenderungan untuk mendorong lebih banyak anggota keluarga memasuki pasar kerja.

#### 4. Struktur usia

Penduduk usia muda umumnya belum memiliki kewajiban ekonomi karena masih dalam tahap pendidikan. Pada usia produktif, khususnya laki-laki, terdapat ekspektasi sebagai pencari nafkah utama sehingga TPAK pada kelompok ini relatif tinggi. Sementara itu, penduduk usia lanjut mengalami degradasi kemampuan kerja, yang menyebabkan TPAK pada kelompok usia muda dan lanjut cenderung rendah.

#### 5. Tingkat upah

Tingkat upah yang kompetitif menjadi daya tarik bagi anggota keluarga untuk memasuki pasar kerja. Dengan kata lain, peningkatan TPAK dapat dipicu oleh tingginya tingkat upah yang tersedia di pasar tenaga kerja.

#### 6. Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi kualifikasi pendidikan seseorang, semakin besar peluang dan waktu yang tersedia untuk berkarier. Pendidikan yang lebih tinggi mampu meningkatkan kapasitas produktivitas dalam bekerja. Kondisi ini menunjukkan adanya korelasi positif antara tingkat pendidikan dengan partisipasi angkatan kerja.

#### 7. Kegiatan ekonomi

Program pembangunan di satu sisi memerlukan keterlibatan lebih banyak tenaga kerja, sementara di sisi lain menciptakan ekspektasi baru di masyarakat. Motivasi untuk mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi termanifestasi dalam peningkatan partisipasi angkatan kerja. Semakin tinggi tingkat partisipasi tersebut, semakin dinamis pula aktivitas ekonomi yang terjadi.

#### **2.1.2.4 Jumlah Penduduk Usia Kerja**

Seseorang yang memiliki kapasitas untuk bekerja dan memproduksi barang atau jasa disebut sebagai penduduk usia kerja. Mulyadi (2017) menjelaskan bahwa penduduk usia kerja merupakan tenaga kerja yang berada dalam rentang usia 15 sampai 64 tahun atau mereka yang mampu menghasilkan barang dan jasa ketika terdapat kebutuhan tenaga kerja serta memiliki keinginan untuk terlibat dalam kegiatan produktif tersebut.

Kementerian Ketenagakerjaan mendefinisikan penduduk usia kerja sebagai mereka yang berada dalam kisaran usia 16 sampai 64 tahun. Pertambahan jumlah penduduk secara langsung berdampak pada peningkatan jumlah penduduk usia kerja. Ketersediaan tenaga kerja akan tetap melimpah meskipun laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan, karena semakin bertambahnya penduduk yang memasuki usia produktif.

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk diklasifikasikan ke dalam tiga kategori usia, yaitu:

1. Kategori usia muda, mencakup penduduk berusia 15–24 tahun.
2. Kategori usia prima, mencakup penduduk berusia 25–60 tahun.
3. Kategori usia lanjut, mencakup penduduk berusia 60 tahun ke atas.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada kelompok usia muda cenderung rendah karena kondisi yang belum mapan dan minimnya keterkaitan dengan pasar ketenagakerjaan. Pada fase ini, masih terbuka peluang untuk mengalokasikan waktu pada kegiatan pendidikan. Seiring dengan kemajuan sektor pendidikan, partisipasi angkatan kerja pada kelompok usia muda mengalami

penurunan karena mereka umumnya belum memiliki kemampuan atau belum diizinkan untuk bekerja atau mencari pekerjaan (Sumarsono, 2003).

Siklus kehidupan manusia menunjukkan bahwa fase usia muda merupakan periode yang penuh dinamika dan ketidakstabilan. Mayoritas dari kelompok ini belum memiliki tanggung jawab finansial terhadap keluarga, sehingga keinginan untuk mencoba berbagai jenis pekerjaan yang dianggap sesuai masih sangat tinggi dan sulit dikendalikan. Selain itu, terdapat kemungkinan ketidakaktifan dalam kegiatan ekonomi.

Pada kelompok usia prima, sebagian besar individu dituntut untuk aktif dalam pasar ketenagakerjaan karena adanya tanggung jawab keluarga atau karena telah berinvestasi waktu dan tenaga pada suatu perusahaan atau posisi jabatan tertentu. Oleh karena itu, tingkat partisipasi pada kelompok usia prima cenderung tinggi dan relatif stabil.

Kelompok usia lanjut umumnya dipandang sebagai fase di mana seseorang tidak lagi aktif bekerja atau telah memasuki masa pensiun. Kondisi ini tercermin dari rendahnya angka TPAK pada golongan usia lanjut. Rendahnya TPAK di usia lanjut dapat dipengaruhi oleh penurunan kondisi kesehatan yang menyebabkan ketidakmampuan untuk tetap aktif dalam pasar ketenagakerjaan. Di samping itu, kemajuan sistem pendidikan dan teknologi mendorong terjadinya regenerasi dari tenaga kerja usia lanjut ke tenaga kerja yang lebih muda, khususnya kelompok usia prima.

## **2.1.3 Tingkat Pendidikan**

### **2.1.3.1 Definisi Tingkat Pendidikan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan merupakan upaya yang disengaja dan sistematis untuk menciptakan lingkungan belajar serta proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan berbagai potensi dalam dirinya, meliputi kekuatan spiritual keagamaan, kemampuan pengendalian diri, pembentukan kepribadian, kecerdasan intelektual, pembinaan akhlak mulia, serta penguasaan keterampilan yang dibutuhkan untuk kepentingan pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara (Handayani 2018).

Harbison dan Myers berpendapat bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu proses untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat (Suhendra dan Wicaksono 2016). Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan menjadi komponen fundamental yang harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Susanto dan Pangesti (2019) mengemukakan bahwa tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan yang berkesinambungan, yang ditentukan berdasarkan tahap perkembangan peserta didik, kompleksitas materi pembelajaran, serta metode penyampaian materi tersebut. Jenjang pendidikan formal meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan mencerminkan derajat kesejahteraan dalam suatu masyarakat. Individu dengan kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi umumnya memiliki standar hidup yang lebih baik karena pendidikan membekali mereka dengan pengetahuan dan

kompetensi yang diperlukan untuk berkembang. Pengetahuan tersebut membuka akses terhadap peluang kerja yang berkualitas dengan tingkat penghasilan yang lebih memadai. Dengan tingkat penghasilan yang lebih baik, kapasitas untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup pun meningkat, sehingga daya beli masyarakat secara keseluruhan mengalami perbaikan.

Hendrayani (2020) dalam Junita dan Mukmin (2022) menguraikan dimensi dan indikator dari tingkat pendidikan. Dimensi pendidikan formal memiliki indikator berupa jenjang pendidikan tertinggi yang telah diselesaikan oleh setiap tenaga kerja, yang mencakup tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Perguruan Tinggi. Sementara itu, dimensi pendidikan informal memiliki indikator berupa sikap dan karakter yang terbentuk melalui pengaruh keluarga dan lingkungan sekitar.

#### **2.1.3.2 Teori *Human Capital***

Definisi *Human Capital* dapat bervariasi tergantung pada teori yang digunakan. Beberapa *teory Human Capital*, antara lain Teori *Human Capital* yang disampaikan oleh Gary Becker. Gary Becker, merupakan seorang ekonom terkenal, memperkenalkan konsep *Human Capital* dalam ekonomi pada tahun 1964. Menurut Becker, *Human Capital* adalah pengetahuan, keterampilan, dan kapabilitas yang dimiliki oleh individu, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Becker menganggap *Human Capital* sebagai investasi yang dapat memberikan pengembalian yang ekonomis, seperti peningkatan produktivitas dan pendapatan individu. Gary S. Becker, seorang ekonom Amerika Serikat yang terkenal dalam bidang mikroekonomi dan teori

modal manusia, mengembangkan *human capital theory* yang melihat manusia bukan hanya sebagai faktor produksi, tetapi juga sebagai modal yang dapat diinvestasikan. Becker (1964) menjelaskan bahwa investasi dalam pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman akan meningkatkan kemampuan individu, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan, produktivitas, dan kesejahteraan. Modal manusia dianggap sebagai aset penting yang memperkuat daya saing serta mendorong pertumbuhan ekonomi pada tingkat individu, keluarga, perusahaan, maupun negara.

Dalam konteks ekonomi rumah tangga, pendidikan merupakan bentuk utama investasi modal manusia. Pendidikan meningkatkan kualitas individu melalui peningkatan kemampuan berpikir, keterampilan kerja, dan produktivitas, yang pada akhirnya meningkatkan peluang memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar akumulasi modal manusia yang dimiliki, sehingga semakin meningkat pula kemampuan dalam mengelola kehidupan ekonomi keluarga, termasuk pengambilan keputusan yang lebih rasional dan terarah (Becker, 1964). Pendidikan yang rendah sering kali membatasi seseorang dalam memahami informasi penting terkait pekerjaan, pendapatan, serta peluang ekonomi lainnya. Kondisi ini dapat mengurangi kemampuan keluarga dalam mencapai stabilitas finansial dan meningkatkan risiko kemiskinan. Sebaliknya, pendidikan yang baik memberikan fondasi kuat dalam pengembangan keterampilan dan kapasitas produktif individu, sehingga berkontribusi positif pada kesejahteraan keluarga melalui peningkatan

akses terhadap pekerjaan layak, penghasilan yang lebih stabil, dan kualitas hidup yang lebih baik (Becker, 1964).

### **2.1.3.3 Faktor yang Mempengaruhi Pendidikan**

Hakim, A. (2020) mengidentifikasi beberapa faktor yang memberikan pengaruh terhadap pendidikan, antara lain:

#### **1. Ideologi**

Setiap manusia yang terlahir di dunia memiliki hak yang setara, khususnya hak untuk memperoleh pendidikan serta pengembangan pengetahuan dan keterampilan.

#### **2. Kondisi Sosial Ekonomi**

Tingkat sosial ekonomi masyarakat yang lebih tinggi memberikan kemungkinan yang lebih besar bagi seseorang untuk mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi pula.

#### **3. Faktor Sosial Budaya**

Masih terdapat banyak orang tua yang belum memahami dan menyadari urgensi pendidikan formal bagi anak-anak mereka. Padahal, semakin tinggi tingkat pendidikan yang berhasil dicapai seseorang, semakin besar pula peluang untuk memperbaiki kualitas hidupnya.

#### **4. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)**

Perkembangan IPTEK yang semakin pesat dari waktu ke waktu menuntut setiap individu untuk terus memperbarui keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya agar tidak tertinggal zaman dan mampu bersaing dengan negara-negara maju.

## 5. Aspek Psikologis

Pada hakikatnya, pendidikan bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan seseorang agar menjadi lebih cerdas, berintegritas, terampil, serta mampu berkembang lebih maju.

### 2.1.3.4 Kategori Tingkat Pendidikan

Menurut (Badan Pusat Statistik (BPS), 2023) Tingkat pendidikan dapat dikategorikan dalam beberapa jenis pengukuran, di antaranya yaitu :

1. Angka Kesiapan Sekolah (AKS) mengacu pada persentase siswa kelas 1 SD yang telah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun ajaran sebelumnya, dibandingkan dengan total jumlah siswa yang saat ini berada di kelas 1 SD.
2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi penduduk dalam kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih mengikuti pendidikan formal, dibandingkan dengan total penduduk dalam kelompok usia tersebut.
3. Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase penduduk dalam kelompok usia tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya, dibandingkan dengan total penduduk pada kelompok usia tersebut.
4. Angka Partisipasi Kasar (APK) mengukur proporsi penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu, tanpa memperhitungkan kesesuaian usia mereka dengan jenjang pendidikan tersebut. Penghitungan ini mencakup seluruh individu yang masih mengikuti pendidikan pada jenjang tersebut,

dibandingkan dengan total penduduk dalam kelompok usia yang seharusnya berada pada jenjang tersebut.

5. Angka Melek Huruf (AMH) mengacu pada persentase penduduk dalam kelompok umur tertentu yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam berbagai sistem tulisan, seperti huruf Latin, Arab, Jawa, Kanji, dan lainnya. Indikator ini dihitung sebagai proporsi dari total penduduk dalam kelompok umur tersebut yang memiliki kemampuan literasi dasar.

6. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator yang menunjukkan jumlah tahun rata-rata pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas selama menjalani berbagai jenjang pendidikan. RLS dihitung berdasarkan total tahun pendidikan yang dilalui, di mana bagi lulusan SD diasumsikan telah menempuh pendidikan selama 6 tahun, lulusan SMP selama 9 tahun, dan lulusan SMA selama 12 tahun, tanpa memperhitungkan apakah individu tersebut pernah tinggal kelas atau tidak selama masa pendidikan.

#### **2.1.3.5 Rata-Rata Lama Sekolah**

Dalam penelitian ini digunakan indikator rata-rata lama sekolah dalam rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai mengukur tingkat pendidikan. Rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan penduduk usia 15 tahun ke atas dengan menggunakan asumsi pada umur 15 tahun ke atas selama menjalani berbagai jenjang pendidikan. Asumsi ini juga berdasarkan standar internasional dimana perhitungan rata-rata lama sekolah pada usia 15 tahun ke atas (Badan Pusat Statistik 2023).

Pada perhitungannya, rata-rata lama sekolah ini memperhitungkan penduduk yang telah menjalani 6 tahun masa sekolah asrtinya penduduk yang tamat SD, untuk tamat SMP diperhitungkan lama sekolah 9 tahun, lalu pada penduduk yang dikatakan tamat SMA adalah penduduk yang sekolah selama 12 tahun. Dengan catatan tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Dalam perhitungan rata-rata lama sekolah ini digunakan langkah perhitungan yakni:

- 1) Melakukan seleksi terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.
- 2) Mengelompokan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki.
- 3) Mengelompokan ijazah tertinggi yang dimiliki.
- 4) Mengkonversi tahun lama sekolah menurut ijazah terakhir.
- 5) Menghitung lama sekolah sampai kelas terakhir.
- 6) Menghitung lamanya bersekolah.

#### **2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka**

##### **2.1.4.1 Definisi Tingkat Pengangguran Terbuka**

Menurut Sadono (2011:13) dalam Putri (2016), pengangguran adalah suatu keadaan ketika seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Salah satu indikator yang sering digunakan pemerintah untuk menilai keberhasilan di bidang ketenagakerjaan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT adalah angka yang menunjukkan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Statistik Indonesia (2024c) juga mendefinisikan TPT sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap dalam pasar kerja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengangguran merupakan situasi ketika seseorang tidak bekerja, sedang berusaha mendapatkan pekerjaan, atau telah memiliki pekerjaan tetapi belum bekerja secara produktif.

Terdapat rumus untuk menghitung TPT, yaitu:

$$\text{TPT} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Dalam rumus tersebut, angkatan kerja didefinisikan sebagai penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Sedangkan pengangguran adalah penduduk yang aktif mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (Badan Pusat Statistik 2024c).

#### **2.1.4.2 Teori Pengangguran**

##### **1. Teori Lewis**

Lewis (1959) dalam Amalia et al., (2022:169) mengutarakan analisisnya yang kritis terhadap asumsi yang dibuat oleh para ekonom sebelumnya, di mana pandangan Neo-klasik tentang penawaran tenaga kerja masyarakat tidak bertambah. Namun, menurut pandangan teoretis John Maynard Keynes, tidak hanya persediaan tenaga kerja yang bertambah, tetapi juga tanah yang tersedia dan kapasitas produksi yang jumlahnya tidak terbatas. Menurut Lewis, hal ini tidak

sesuai dengan keadaan sebenarnya di negara-negara berkembang, karena negara-negara tersebut memiliki masalah tenaga kerja yang sangat tinggi atau berlebihan tanpa diimbangi dengan ketersediaan modal. Lewis menyatakan tujuan dari teori mengenai proses pembangunan yang khusus diperuntukan bagi negara yang menghadapi masalah kelebihan tenaga kerja. Lewis menganggap di banyak negara berkembang terdapat tenaga kerja yang berlebih, akan tetapi sebaliknya, ternyata menghadapi masalah kekurangan modal dan keluasan tanah yang belum digunakan sangat terbatas.

## 2. Teori Ranis dan Fei

Ranis dan Fei (1961) dalam Amalia et al., (2022:172) adalah ekonom yang dikenal dengan teori yang berjudul *A Theory of Economic Development* yang berarti bahwa negara terbelakang melewatkan proses transisi yang dapat dicapai untuk beralih dari keadaan stagnan ke pertumbuhan yang lebih baik. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori Lewis. Analisis teori ini bertujuan sebagai teori pembangunan bagi suatu negara yang menghadapi masalah *over* populasi, sehingga negara tersebut memiliki masalah pengangguran yang serius dan ketersediaan sumber daya alam yang dapat dieksploitasi sangat terbatas.

### 2.1.4.3 Jenis Pengangguran

Menurut Sumarsono (2019), di pasar tenaga kerja, pengangguran terjadi akibat ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Berikut adalah beberapa jenis pengangguran:

1. Pengangguran reguler atau friksional

Pengangguran ini dianggap normal karena terjadi akibat kesulitan dalam mencocokkan pencari kerja dengan lowongan pekerjaan yang tersedia. Proses ini memerlukan waktu sehingga menimbulkan pengangguran sementara.

2. Pengangguran musiman

Jenis pengangguran ini dipengaruhi oleh siklus musiman yang berdampak pada kegiatan ekonomi suatu komunitas. Pada musim puncak tenaga kerja sangat dibutuhkan, sedangkan pada musim sepi aktivitas menurun tajam sehingga sebagian tenaga kerja menganggur. Pengangguran ini biasanya bersifat sementara dan akan teratasi saat musim puncak kembali.

3. Pengangguran siklis atau berkala

Pengangguran ini terjadi ketika dunia usaha kehilangan kepercayaan terhadap prospek masa depan sehingga aktivitas ekonomi menurun. Kondisi ini mengurangi kesempatan kerja dan meningkatkan angka pengangguran.

4. Pengangguran struktural

Jenis pengangguran ini terjadi akibat perubahan struktur ekonomi yang menyebabkan kebutuhan keterampilan tenaga kerja ikut berubah. Pencari kerja yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan baru akan mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan.

5. Pengangguran teknologi

Pengangguran ini disebabkan oleh kemajuan teknologi atau penggunaan mesin dalam proses produksi, yang menggantikan tenaga kerja manusia. Perubahan

ini dapat menyebabkan pekerja kehilangan pekerjaan karena peran mereka digantikan oleh mesin atau sistem otomatis.

#### **2.1.4.4 Dampak Pengangguran**

Menurut Nanga (2005) dalam Rianda (2020), pengangguran dalam suatu perekonomian tidak hanya berdampak negatif terhadap kinerja ekonomi secara keseluruhan, tetapi juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi sosial dan kesejahteraan individu dalam masyarakat. Secara umum, dampak pengangguran dapat dikelompokkan menjadi dua aspek utama, yaitu dampak terhadap perekonomian dan dampak terhadap individu serta masyarakat.

##### **1. Pengaruh Pengangguran terhadap Perekonomian**

###### **a. Menurunnya output dan kesejahteraan ekonomi**

Tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan sebagian tenaga kerja produktif tidak berkontribusi dalam kegiatan ekonomi, sehingga hasil produksi (*output*) yang dicapai berada di bawah potensi yang seharusnya dapat diraih. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih rendah daripada tingkat yang ideal atau potensial.

###### **b. Menurunnya penerimaan pemerintah**

Kenaikan tingkat pengangguran juga berdampak pada penurunan pendapatan negara karena berkurangnya penerimaan pajak dari tenaga kerja maupun dunia usaha. Kondisi ini membatasi kemampuan pemerintah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan dan kebijakan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### c. Terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi sektor swasta

Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menurunkan aktivitas ekonomi sektor swasta. Ketika banyak tenaga kerja menganggur, perusahaan cenderung mengalami kelebihan kapasitas produksi dan penurunan permintaan, sehingga enggan melakukan investasi baru. Akibatnya, laju pertumbuhan ekonomi menjadi stagnan dan potensi pengembangan ekonomi masa depan semakin terhambat.

## 2. Pengaruh Pengangguran terhadap Individu dan Masyarakat

### a. Penurunan pendapatan dan kesejahteraan keluarga

Kehilangan pekerjaan menyebabkan menurunnya pendapatan individu dan rumah tangga. Di negara maju, pemerintah biasanya menyediakan tunjangan pengangguran untuk menopang kebutuhan hidup sementara, namun di negara berkembang seperti Indonesia, sistem jaminan sosial tersebut belum memadai. Akibatnya, pengangguran seringkali harus bergantung pada tabungan pribadi atau bantuan keluarga, yang dapat menimbulkan tekanan ekonomi dan sosial.

### b. Penurunan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja

Pengangguran yang berlangsung lama dapat menurunkan keterampilan kerja (*skill deterioration*), karena kemampuan seseorang akan berkurang apabila tidak digunakan secara berkelanjutan. Hal ini membuat tingkat produktivitas tenaga kerja menurun dan memperbesar kesulitan dalam memperoleh pekerjaan kembali di masa depan.

## 3. Meningkatnya ketidakstabilan sosial dan politik

Tingkat pengangguran yang tinggi juga berpotensi menimbulkan ketidakpuasan sosial terhadap pemerintah. Kondisi ekonomi yang sulit dapat

memicu meningkatnya tindak kriminalitas seperti pencurian dan perampokan, serta mengganggu stabilitas sosial dan politik. Dengan demikian, pengangguran tidak hanya menjadi masalah ekonomi, tetapi juga ancaman terhadap stabilitas sosial dan keamanan nasional.

#### **2.1.4.5 Penanggulangan Pengangguran**

Menurut Nanga (2001) dalam Rianda (2020) dalam Terdapat sejumlah langkah strategis yang dapat ditempuh untuk menanggulangi permasalahan pengangguran di Indonesia, di antaranya:

- a. Para penganggur dapat mengembangkan kreativitas mereka dengan membangun usaha secara mandiri melalui kewirausahaan.
- b. Mengembangkan lembaga pendidikan yang berorientasi pada kecakapan hidup dan keterampilan praktis, seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- c. Mengembangkan program kerjasama dengan negara lain untuk penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.
- d. Mendorong pengembangan sektor informal seperti industri rumah tangga (*home industry*).
- e. Melaksanakan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sektor pertanian dan sektor informal lainnya.
- f. Memperluas kesempatan kerja melalui pembukaan industri padat karya di daerah-daerah yang memiliki tingkat pengangguran tinggi.
- g. Meningkatkan investasi, baik untuk pengembangan usaha yang sudah ada maupun pendirian usaha baru yang mampu menyerap tenaga kerja.

- h. Pemerintah dapat membuka proyek-proyek pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan raya, jembatan, dan fasilitas publik lainnya.
- i. Menyenggarakan program pendidikan dan pelatihan yang bersifat praktis sehingga seseorang tidak hanya menunggu kesempatan kerja yang terbatas, melainkan mampu mengembangkan usaha sendiri untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan secara mandiri.

### 2.1.5 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nurhaila, K. A, 2024. "Analisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Penduduk Miskin...".	Menggunakan variabel TPAK sebagai variabel independen	Wilayah: 10 Kabupaten di Provinsi Aceh; hanya TPAK & IPM	TPAK tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.	Jurnal Ekonomi Regional Unimal, Volume 06 Nomor 3
2	Oktaf, G. E & Talakua, J, 2025. "Pengaruh Jumlah Penduduk, IPM, dan TPT terhadap Kemiskinan di DIY 2018-2023"	Fokus wilayah DIY, variabel TPT sebagai variabel independen	Tidak mencakup TPAK dan pendidikan sebagai variabel bebas	TPT berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di DIY.	Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, Vol. 14, No. 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Asmi, R. M& Pratomo, D. S, 2025. "Analysis of The Influence of Economic Growth, Education and Unemployment Level on Poverty in The Special Region of Yogyakarta"	Menggunakan variabel Pendidikan dan pengangguran	Menggunakan data Panel 2019–2023	Menemukan pengaruh signifikan pendidikan & pengangguran terhadap kemiskinan.	<i>Journal of Development Economic and Social Studies (JDESS)</i> , Vol. 4, No. 3
4	Susanto, R., & Pangesti, I., 2019 "Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta"	Menggunakan variabel Pendidikan	Data periodik berbeda	Pendidikan berperan signifikan menurunkan kemiskinan jangka panjang.	<i>Journal of Applied Business and Economic</i> Vol. 5 No. 4
5	Handani & Suharianto, 2025. "Pengaruh TPT, PDRB, dan TPAK Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara Periode 2002-2023"	Variabel TPAK, dan TPT sebagai variabel independen	Fokus di Prov Sumatera Utara, periode 2002-2023	TPAK berpengaruh negatif signifikan; TPT tidak signifikan pada model mereka.	Jurnal Ekonomi dan Keuangan Volume. 3 Nomor. 2
6	Fayza et al, 2025. "The Effect of Education and Unemployment on Poverty in Indonesia's 34 Provinces (2018–2023): The Mediating Role of the Human Development Index".	Menggunakan Variabel Pendidikan dan pengangguran	Menguji peran mediasi HDI; model struktural	Pengangguran meningkatkan kemiskinan; pendidikan mempengaruhi HDI yang menurunkan kemiskinan.	Balance Jurnal Ekonomi, Volume 21 No 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Alifah, K. I&Imaningsih, N. (2023). "Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, & Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta"	Variabel pendidikan dan TPT sebagai variabel independen	Fokus DIY 2010–2021; menambahkan upah minimum	Tingkat pendidikan serta TPT tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta	Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Vol. 12, No. 1
8	Sari, Y. A. (2021). " Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah "	Variabel TPT sebagai variabel independen	Fokus pada periode Tahun 2010-2019	Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan	Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Vol. 10, No. 2
9	Mirah et.al, 2020. "Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara"	Variabel TPAK sebagai variabel independen	Dari tahun 1997-2019 sedangkan alat analisis yang digunakan adalah Analisis Jalur	TPAK laki-laki dan Perempuan mampu memberikan pengaruh positif dan signifikan	Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Vol. 21, No. 1
10	Fitria, D& Diana Novita. (2024). "Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh"	Variabel TPAK & pendidikan sebagai variabel independen	Fokus pada periode Tahun 2010-2023 dan di wilayah Provinsi Aceh	TPAK berpengaruh positif dan tidak signifikan, sedangkan RLS berpengaruh negatif dan signifikan	<i>Journal Transformation of Mandalika</i> , Vol. 5, No. 12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Hakim, L., & Hailuddin, (2024). " Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Kemiskinan Di Provinsi Ntb Pada Tahun 2010-2021"	Menggunakan Time series, variabel TPT sebagai variabel independen	Fokus pada periode Tahun 2010-2021 dan di wilayah Provinsi NTB	Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh secara signifikan terhadap Jumlah Kemiskinan	<i>Journal of Economics and Business</i> , Vol. 10, No. 1
12	Anfa, N. S., & Bintariningtyas, S 2022. "Kemiskinan,Pendidikan, Pengangguran, Dan Disparitas Pendapatan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta"	Variabel pendidikan dan TPT sebagai variabel independen	Analisis regresi data panel tahun 2011 hingga 2021	Pengangguran memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan, sedangkan pendidikan memiliki pengaruh positif yang signifikan	Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 22, No. 1
13	Wardianti, D. P.,etal (2024). "Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Rata-rata Lama Sekolah terhadap Kemiskinan di Kota Yogyakarta pada tahun 2010 - 2023"	Variabel TPT dan RLS sebagai variabel independen	Fokus pada data tahunan 2010-2023	TPT dan RLS berdampak signifikan sebesar 44,5%	Buletin Ekonomika Pembangunan, Vol. 5, No. 2
14	Hidayah, N. R. (2024). " Analisis Dampak Pendidikan, Perumahan, dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota se-Jawa Timur "	Variabel TPT dan pendidikan sebagai variabel independen	Tidak menelitian TPAK	Pendidikan dan TPT mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemiskinan	Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 8 No. 1,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	Nabilawaty, R. C., & Hutajulu, D. M. (2021) " Analisis Determinan Kemiskinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 – 2020"	Menggunakan variabel TPT	Tidak Meneliti TPAK dan RLS, Menggunakan data panel	Tingkat pengangguran memiliki andil dalam tinggi rendahnya tingkat kemiskinan	Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi, Vol 6, No. 2

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Sudah merupakan ketentuan umum bilamana pemecahan suatu masalah diperlukan suatu landasan. Hal ini dimaksudkan agar dalam pembahasannya tersebut mempunyai arah yang pasti dalam penyelesaiannya. Maka dari itu, penulis menyusun kerangka pemikiran dalam penelitian ini untuk menjelaskan hubungan antar variabel yakni seperti berikut.

### 2.2.1 Hubungan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Tingkat Kemiskinan.

Menurut Teori Lingkaran Setan Kemiskinan, rendahnya produktivitas merupakan salah satu penyebab utama kemiskinan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencerminkan sejauh mana penduduk usia produktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. TPAK yang rendah menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja tidak berkontribusi secara optimal dalam proses produksi, sehingga output ekonomi yang dihasilkan menjadi terbatas. Rendahnya partisipasi tenaga kerja menyebabkan jumlah penduduk yang bekerja dan memperoleh pendapatan menjadi lebih sedikit. Akibatnya, produktivitas ekonomi tetap rendah dan masyarakat sulit keluar dari kemiskinan. Penelitian Murialti dan Romanda

(2020) menemukan bahwa TPAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, di mana peningkatan partisipasi angkatan kerja mampu menurunkan persentase penduduk miskin.

TPAK yang rendah dapat memicu kemiskinan karena sebagian besar individu tidak aktif dalam pencarian pekerjaan. Di sisi lain, TPAK yang tinggi berpotensi meningkatkan pendapatan rumah tangga dan membuka lebih banyak peluang kerja, sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Apabila TPAK mengalami peningkatan tanpa diikuti oleh penambahan kebutuhan tenaga kerja, maka dampaknya terhadap kemiskinan cenderung netral atau bahkan kontraproduktif. Sebaliknya, ketika kebutuhan tenaga kerja meningkat secara proporsional dengan TPAK, akan terjadi peningkatan pendapatan, penurunan tingkat pengangguran, dan pada akhirnya berkontribusi pada pengurangan tingkat kemiskinan. Namun demikian, meskipun partisipasi angkatan kerja tinggi, apabila kualitas pekerjaan dan tingkat upah rendah serta sektor informal mendominasi, kemiskinan tetap akan berlangsung (Wahed et al., 2021).

### **2.2.2 Hubungan Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan.**

Dalam Teori Lingkaran Setan Kemiskinan, pendidikan yang rendah mencerminkan keterbelakangan sumber daya manusia yang menyebabkan rendahnya kemampuan, keterampilan, dan efisiensi tenaga kerja dalam proses produksi. Widya Ningsih et al. (2022) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa semakin tinggi rata-rata lama sekolah masyarakat, maka semakin rendah tingkat kemiskinan yang terjadi.

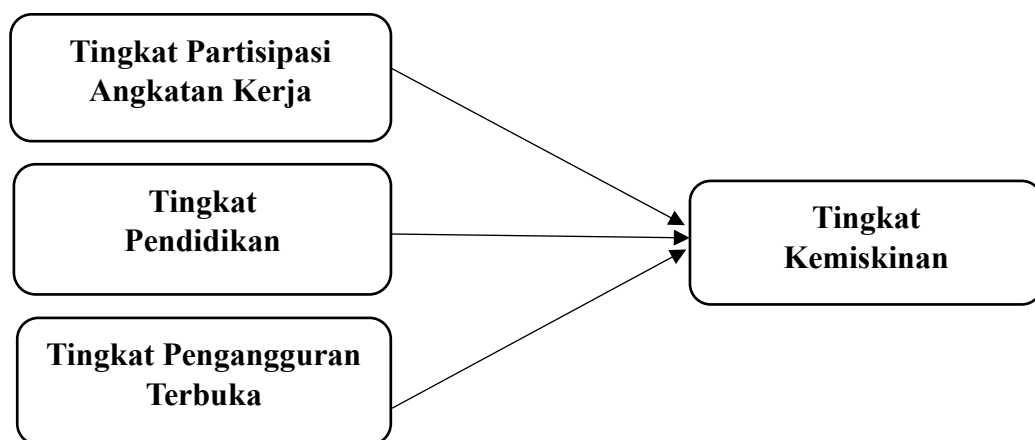
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dalam penelitian digunakan untuk mengukur pengaruh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang diperoleh melalui pendidikan formal yang ditempuh seseorang. Semakin lama seseorang menempuh pendidikan, secara otomatis akan meningkatkan pengetahuan dan produktivitas mereka, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan (Arsyad dalam Hasanah et al., 2021). Sektor pendidikan merupakan fondasi pembentukan sumber daya manusia sebagai investasi jangka panjang. Tercapainya tujuan pembangunan dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Investasi di bidang pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mendorong peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang berpengaruh pada peningkatan produktivitas tenaga kerja individu (Junaidi et al, dalam Syabrina, et al., 2021).

### **2.2.3 Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Tingkat Kemiskinan.**

Dalam Teori Lingkaran Setan Kemiskinan Ketidaksempurnaan pasar tenaga kerja tercermin dari ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar, serta keterbatasan kesempatan kerja. Kondisi ini menyebabkan sebagian angkatan kerja tidak terserap dalam kegiatan produksi meskipun memiliki keinginan untuk bekerja. Akibatnya, pengangguran meningkat. Hardinandar (2019) menemukan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, di mana peningkatan pengangguran menyebabkan menurunnya pendapatan rumah tangga dan meningkatnya jumlah penduduk miskin.

Semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin besar kemungkinan masyarakat mengalami kemiskinan karena tidak memiliki sumber penghasilan yang tetap. Masyarakat yang tidak bekerja atau bekerja secara tidak tetap cenderung berada pada kelompok masyarakat miskin, sementara mereka yang memiliki pekerjaan dengan penghasilan tetap berpeluang masuk dalam kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Tingginya angka pengangguran juga berdampak pada penurunan produktivitas masyarakat secara keseluruhan, yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan per kapita dan tingkat kesejahteraan masyarakat (Imanto dkk., 2020).

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah disampaikan dan didukung oleh penelitian sebelumnya, variabel seperti tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pendidikan, dan tingkat pengangguran terbuka akan dianalisis untuk melihat pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan di provinsi daerah istimewa yogyakarta. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antar variabel tersebut, dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 2.4**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

- a. Diduga secara parsial Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007–2024.
- b. Diduga secara bersama -sama Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007–2024.